

Metode alternatif pengawasan objek pajak berdasarkan harta bersih = Alternative methods of monitoring taxobjects based on net assets / Ronny Wicaksono

Ronny Wicaksono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20495826&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan harta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar 10.7%. Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh Account Representative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta tersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanya dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

ABSTRACT

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnesty disclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7%. The system of selfassessment, investigation, inspection and supervision by the Account Representative still shows weaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory of planned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance, the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with Taxpayer Tax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and Government Regulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conducting interviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicable laws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, so that non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.